

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN
LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH B3 DI KABUPATEN BREBES**



Diajukan oleh :

Fhilippo Apriando

NPM	:	170512815
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN
LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH B3 DI KABUPATEN BREBES**



Diajukan oleh :

Fhilippo Apriando

NPM : 170512815
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing,

Tanggal

: 23 November 2020

Hyronimus Rhiti, SH.,LL.M

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H.R.", is placed next to the "Tanda Tangan" label.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN
LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH B3 DI KABUPATEN BREBES**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Senin
Tanggal : 21 Desember 2020
Tempat : Melalui Media Zoom**

Susunan Tim Penguji

Ketua : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Sekretaris : Linda, S.H., M.KN

Anggota : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

**Tanda
Tangan**

.....
[Signature]
[Signature]
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan realisasi bentuk keseriusan dan tanggungjawab saya terhadap apa yang diharapkan dan diinginkan oleh orang-orang disekitar yang mencintai saya, yang mengharapakan saya dapat lulus dengan gelar Sarjana tepat waktu. Skripsi ini juga merupakan persembahan kecil dari saya kepada orang-orang yang paling berharga dan istimewa dihidup saya yaitu Tuhan Yesus Kristus, kedua orang tua saya yaitu Drs. Benjamin Thomas Girsang dan Rosniuli Sipayung,S.H dan pasangan saya yaitu Agatha Intan Setia Dewanti. Selain itu pula kepada masyarakat Kabupaten Brebes dan aparat penegak hukum dalam bidang lingkungan hidup untuk dapat menjamin kepastian hukum dalam sanksi yang diberikan terhadap pelaku pencemaran.

MOTTO

“Non schole, sed vitae discimus”

“Don’t lost the first goal, because the second goal”



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya adli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, November 2020

Yang menyatakan,

Fhilippo Apriando

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaanNya kepada penulis sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat diselesaikan. Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul Pengaturan tentang Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 di Kabupaten Brebes yang disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Tinggi tingkat strata satu (S1) dan memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah turut memberikan dukungan dan bantuan dalam persiapan, proses hingga menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi, yaitu kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dari awal penulisan sampai sidang akhir di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hukum/skripsi ini.
3. Bapak Hyronimus Rhiti, SH.,LL.M, sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis terutama dalam bidang ilmu hukum dan lingkungan hidup, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta atas seluruh bimbingan yang telah diberikan dalam bentuk pengajaran dan masukan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Pemerintah Kabupaten Brebes yang telah mengizinkan untuk mengakses dan mengambil data melalui website Pemerintah Kabupaten Brebes guna membantu penulis dalam penulisan skripsi ini di masa pandemic Covid-19.
6. Kedua orang tua penulis yaitu Benjamin Thomas Girsang dan Rosniuli Sipayung yang selalu memberikan dukungan moral dan finansial juga banyak motivasi sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Kedua adik-adikku yaitu Yansen Morghan dan Pricilia Meilany yang selalu memberikan semangat dari jauh kepada penulis.
8. Pasangan penulis Agatha Intan yang selalu sabar menemani dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Segenap keluarga PONGCAH terutama inang yang selalu memberikan masukan, semangat, dan doa kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Kak Audina Tobing dan Kak Alit Darwin yang telah mendukung dan membantu penulis dalam memberikan gambaran terhadap penulisan skripsi.
11. Sobat-sobat seminaris yang ada di Jogja Payung, Ario, Roy yang telah mendukung dan menemani penulis dalam penulisan skripsi, serta seluruh sobat seminaris lainnya yang memberikan dukungan dari jauh.
12. Sobat-sobatku Reynaldi, Waskitamukti, Elfanrio, Reza Aldo dan seluruh rekan-rekan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk dukungan dan bantuan yang

diberikan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sampai terselesaikannya skripsi ini.

13. Partai Mahasiswa Peduli, Lembaga Belajar Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta selaku OPP yang telah menjadi ruang bagi penulis untuk berdinamika dan mengenal banyak hal dalam berorganisasi.
14. Teman-teman KKN 78 Kelompok 92 yang telah mengerti dan memberi dukungan terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak, teman-teman dan saudara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, baik dalam kalimat maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

ABSTRACT

The Industry activity in Kabupaten Brebes (Regency of Brebes), in fact still has challenge with Dumping and Industrial Waste Management that potentially effect Environmental Stability and Pollution. Criminal Sanction will be on the top choice compared to Civil and Administrative Law. Therefore, we need clear direction and regulation with regards to the implementation of Criminal Sanction for suspect of B3 Waste in Environmental Pollution. The goal for this writing is to have a better understanding on Regulation of Criminal Sanction for the suspect in B3 Waste Environmental Pollution In Kabupaten Brebes, followed with what challenge that has been faced together with solution. Research Method used by the writer is a normative writing that focused on the Law. The result of this research is that the Criminal Sanction to the suspect of B3 Waste Pollution as it is regulated by the Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, the implementation of the sanction is relatively ineffective compared to the accused action. Finally, We need a firm action and legal certainty by the Government regarding the limitation of classified action with affect resulted, where can referenced to Government Law No. 101 of 2014 concerning Hazardous and Toxic Waste Management.

Keywords : *Regulation of Criminal Sanction, B3 Waste, Regency of Brebes*

DAFTAR ISI

Table of Contents

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II.....	20
PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan umum tentang Penerapan Sanksi Pidana	20

1. Pengertian Sanksi Pidana	20
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	22
B. Tinjauan Umum tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	26
1. Pengertian Limbah dan Limbah golongan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).....	26
2. Dasar Hukum dan Pengaturan	27
3. Jenis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).....	28
C. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Limbah B3 di Kabupaten Brebes.....	29
1. Gambaran Kabupaten Brebes	29
2. Gambaran tentang Pencemaran melalui Limbah B3 di Kabupaten Brebes.	35
D. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Akibat Limbah B3 di Kabupaten Brebes.	38
E. Kendala dan Solusi Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3.....	52
BAB III	56
PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
Daftar Pustaka	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam status ekonominya dapat dikategorikan sebagai sebuah negara industri. Sektor industri merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan sumbangannya mencapai lebih dari 20 persen¹. Hal ini tentu tidak lepas dari peran pemerintahan masing-masing wilayah di Indonesia yang memiliki kebijakan tersendiri dalam memajukan wilayahnya. Seperti halnya di Kabupaten Brebes yang memiliki daerah strategis dan memiliki beragam potensi yang menarik minat para investor untuk mendaftar dan mendirikan pabrik di sana. Presiden RI Joko Widodo memberikam amanat untuk menjadikan Brebes sebagai kawasan industri baru dengan harapan mampu mendorong tumbuhnya invensi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat².

Kegiatan Industri di Kabupaten Brebes pada kenyatannya masih dihadapkan dengan persoalan *dumping* atau pengelolaan limbah industri yang berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan dan akan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup³. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

¹ Kementerian Perindustrian, Indonesia Masuk Kategori Negara Industri, <https://www.kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri>, diakses pada 20 September 2020.

² Supardji Rasban, Penetapan Kawasan Industri Kabupaten Brebes Dorong Pertumbuhan Ekonomi, hlm. 1 <https://mediaindonesia.com/nusantara/258025/penetapan-kawasan-industri-brebes-dorong-pertumbuhan-ekonomi>, diakses pada 20 September 2020.

³ Putusan MA No.56/Pid.B/LH/2020/PN.Bbs

Hidup, menyebutkan bahwa *dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Berdasarkan nilai ekonomisnya, limbah dibedakan menjadi limbah yang mempunyai nilai ekonomis dan limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis⁴. Limbah yang memiliki nilai ekonomis adalah limbah yang melalui suatu proses lanjut akan memberikan suatu nilai tambah. Limbah non ekonomis adalah suatu limbah, walaupun telah dilakukan proses lanjut dengan cara apa pun, tidak akan memberikan nilai tambah kecuali sekedar mempermudah sistem pembuangan seperti halnya limbah yang dikategorikan sebagai golongan B3.

Pada Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengatur mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun itu yang mengatakan:

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.*
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.*
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.*

⁴Darmono, 2001, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran : Hubungannya dengan Toksikologi senyawa logam*, UI-Press, Jakarta, hlm 25.

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah

Ayat 7 dari Pasal 59 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pasal 1 angka 1 PP No. 101 Tahun 2014 tersebut mendefinisikan bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun (disingkat B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan industri di Kabupaten Brebes menyebabkan semakin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko pencemaran terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin, termasuk mengendalikan limbah bahan berbahaya dan beracun. Upaya

pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar pelaksanaannya menaati peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28H) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam mengelola SDA (Sumber Daya Alam) untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat⁵.

Meningkatnya laju pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri berpotensi besar menimbulkan akibat terganggunya lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini disebabkan karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri mengandung sejumlah unsur kimiawi berbahaya dan beracun yang dapat mencemari air, merusak tanah dan tanaman serta berakibat lebih jauh terhadap kesehatan makhluk hidup atau tau sekurang-kurangnya mendegradasi kualitas lingkungan hidup, dan semua pihak harus menanggungnya. Dalam hal mengatasi masalah

⁵Mira Rosana, 2018, Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia, Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1 No.1, Universitas Pasundan, hlm. 156

pencemaran lingkungan seharusnya perlu penerapan sanksi pidana yang bersifat *primum remedium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana diterapkan sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, dipandang tidak efektif karena beberapa kelemahan⁶. Pada umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan untuk penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerawanan kejahatan lainnya. Maka, sudah seharusnya tindak pencemaran lingkungan harus disikapi dengan tegas melalui sanksi-sanksi pidana bagi pihak-pihak yang harus bertanggungjawab sepenuhnya.

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus ternyata cukup banyak contoh kasus yang menunjukkan belum diterapkannya sanksi pidana yang memenuhi nilai-nilai tujuan pemidanaan baik untuk memberikan efek jera kepada si pelaku atau pun untuk memberikan efek pencegahan umum kepada masyarakat luas. Sebaliknya, sanksi pidana juga dijadikan senjata untuk melemahkan para pihak yang seharusnya tidak sepenuhnya bersalah. Pada gilirannya penerapan sanksi pidana yang demikian itu juga kurang/tidak mencerminkan nilai kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang menjadi tujuan hukum⁷. Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat topik yang berjudul

⁶Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Pusat penerbitan dan pencetakan (AUP), 2016, hlm. 8.

⁷Harjanto, 2016, *Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Denda Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar*, Universitas Tanjungpura Vol. 01 No. 01, hlm. 3.

“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Di Kabupaten Brebes”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kabupaten Brebes ?
2. Apa saja kendala dan solusi bagi penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai pengaturan tentang penerapan

sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kabupaten Brebes.

- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaturan penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk responsif dan aspiratif untuk merancang, menyusun, dan memberlakukan Undang-Undang dan kebijakan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan pengaturan penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3.
- b. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sebagai masukan untuk mempertegas kebijakan hukum yang telah berlaku dan strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan hidup melalui limbah bergolongan B3 melalui pengaturan penerapan sanksi pidana. Mengingat dalam setiap tindakan pencemaran lingkungan telah diatur perihal penjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. Sehingga nantinya masyarakat paham akan tindakan yang dilakukannya dan memberikan efek jera yang dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan.
- c. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sebagai bentuk aspiratif yang dapat membantu kementerian untuk melaksanakan salah satu

misinya yaitu meningkatkan industri yang mandiri, bergaya saing, dan maju, serta industri hijau melalui kebijakan-kebijakan di bidang perindustrian terutama dasar acuan dalam perannya mengawasi dan membuat suatu kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait pengelolaan limbah B3. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pengelola kawasan industri karena untuk menciptakan tata ruang dan infrastruktur yang ramah lingkungan, aman dan nyaman dalam berusaha tidak terlepas dari lingkungan dan masyarakat sekitar.

- d. Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai badan pemerintahan yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di wilayah teritorialnya, terlebih dalam kegiatan industri yang berdampak langsung dengan lingkungan hidup. Sejauh mana kejelasan peran Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memberikan bantuan berupa pemahaman dan evaluasi kepada masyarakat Kabupaten Brebes terkait kewajiban-kewajiban dalam mengelola limbah bergolongan B3 beserta aturan sanksi pidana yang diberlakukan apabila terjadi pelanggaran pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah B3.
- e. Bagi penulis, yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum atau skripsi dengan judul pengaturan tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3

di Kabupaten Brebes ini bukan plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembanding ada tiga skripsi yaitu:

1. Julio Sebastian, NPM : 100510415, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015. Judul skripsi: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pasal 118 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rumusan Masalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 118 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

Hasil penelitiannya adalah bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup dilakukan dengan bentuk pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 118 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembebanan pertanggungjawaban pengganti dikenakan pada korporasi atas perbuatan yang dilakukan sebagai pelaku fungsional (*Functioneel Daderschap*). Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh agen korporasi ditunjukan untuk kepentingan korporasi, sehingga pembedaan dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan fisik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada

pertanggungjawaban pidana secara langsung kepada korporasi. Dalam perkembangannya, sangat dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban kepada korporasi secara langsung dan pengurus korporasi, sehingga bentuk sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi adalah pidana denda dan sanksi pidana yang bersifat administratif serta bentuk sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pengurus korporasi adalah pidana badan sebagaimana yang terapat di dalam Pasal 10 KUHP.

2. Ganjar Kamaludin Kamil, NIM : 208 301 188, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2012. Judul skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Polda Jawa Barat). Rumusan Masalah: bagaimanakah penegakan hukum terpadu yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam rangka penegakan hukum pidana ?

Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus tindak pidana lingkungan dalam hal ini pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ?
Bagaimanakah upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ?

Hasil penelitiannya adalah Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku dumping limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah melakukan penegakan hukum terpadu dan dalam proses penegakan hukum terpadu berdasarkan MOU (Memorandum Of Understanding) yang dibuat dan disepakati bersama, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bisa terlepas dari Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup dan Tim Ahli untuk bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana lingkungan hidup dalam hal ini dumping limbah. Kemudian Kepolisian mempunyai hambatan atau kendala, baik itu dari segi perbedaan pemahaman hukum antara aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup sampai pada masalah minimnya anggaran yang dimiliki oleh Kepolisian tidak sebanding dengan biaya yang diperlukan oleh Penyidik Kepolisian untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan.

Selain hal itu, perlu dilakukan upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku *dumping* oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan melakukan proses penyidikan dan proses penyidikan yang harus diperhatikan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku *dumping* yaitu yang pertama dengan keharusan mendatangkan serta ahli pidana dan ahli lingkungan hidup. Kedua, perluasan alat bukti. Ketiga, dalam pemeriksaan oleh kepolisian di lokasi dapat mendatangkan Dinas Lingkungan Hidup serta petugas Laboratorium BPMKL (Badan Penguji Mutu Konstruksi dan Lingkungan). Keempat, untuk pengambilan alat bukti dalam *dumping*

dilakukan melalui media lingkungan yang tercemar oleh limbah tersebut. Kelima, Penetapan menjadi tersangka *dumping* limbah atas nama badan usaha yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dapat ditetapkan kepada pemimpin perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 116 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Siti Alawiyah Hasibuan , NIM : 150200188 , Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2019. Judul skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping (Pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin (Studi Putusan No: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr). Rumusan Masalah: bagaimana pengaturan hukum mengenai pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan dumping limbah tanpa izin ? Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan dumping limbah tanpa izin ? Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan dumping limbah tanpa izin (Analisis Putusan No : 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr) ?

Hasil Penelitiannya adalah Pengaturan hukum mengenai pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan dumping limbah tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,

dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Selain itu, Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam hal dumping limbah tanpa izin adalah pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 116- 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila yang bertanggung jawab dalam tindak pidana adalah pengurus atau pemberi perintah dalam kegiatan korporasi tersebut, maka pengurus atau pemberi perintah yang dalam hal ini adalah orang perorangan dapat dijatuhi dengan pidana penjara dan denda sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, inilah yang dinamakan *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti). Sanksi pidana dumping limbah tanpa izin diatur dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Putusan No : 115/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr, disimpulkan bahwa putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan sangatlah penting dimana majelis hakim harus mempertimbangkan secara matang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

bulan dan denda sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mana tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Penulis menganggap putusan ini terlalu ringan untuk terdakwa, mengingat dampak dari dibuangnya limbah cair yang berasal dari pabrik tahu milik terdakwa telah merusak lingkungan yang menyebabkan sungai tercemar, merusak ekosistem sungai dan menyebabkan bau yang tidak sedap sehingga masyarakat yang tinggal di daerah sungai tersebut merasa terganggu dan tidak nyaman. Sehingga menurut penulis putusan ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak memenuhi prevensi general bagi masyarakat atau perusahaan lain.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya Julio Sebastian menekankan pada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 118 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ganjar Kamaludin Kamil menekankan pada upaya penjatuhan sanksi pidana dan penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku dumping limbah B3 dikaitkan dengan UU No.32 Tahun 2009. serta kendala yang dihadapi oleh Polda terhadap kasus-kasus pencemaran lingkungan. Siti Alawiyah Hasibuan yang

menekankan pada bagaimana pengaturan hukum mengenai pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan dumping serta bagaimana pertanggungjawaban dan penerapan hukum pidana terhadap para pelaku pencemaran lingkungan berdasarkan analisis putusan No : 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr.Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah Pengaturan Tentang Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Di Kabupaten Brebes.

F. Batasan Konsep

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.⁸
2. Sanksi Pidana menurut pendapat Anselm Von Feurbach dalam ajarannya tentang “Tekanan Psikologis” adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana dikenakan apabila subjek hukum melanggar ketentuan-ketentuan atau peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana. Sanksi pidana tersebut dijatuhkan sebagai hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan atau subjek yang merupakan pelaku utama dari perubahan situasi tertentu.
4. Pencemaran Lingkungan menurut Pasal 1 angka 14 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke

⁸Ibid., hlm. 1180.

dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

5. Pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (disingkat B3) menurut Pasal 1 angka 21 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
6. Kabupaten Brebes adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayahnya 1.902,37 km², jumlah penduduknya sekitar 1.732.719 jiwa. Ibu kotanya ada di Kecamatan Brebes.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah berfokus pada peraturan perundang-undangan.

2. Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Lembaran

Negara Tahun 2009 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Lembaran Negara Nomor 333 Tahun 2014; Tambahan Lembaran Negara No 5617.

4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN Bbs tentang kasus melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan tanpa izin.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, pendapat para ahli, internet. Selain itu, pendapat hukum juga dapat diperoleh dari kamus hukum dan non hukum juga penelitian terdahulu yang mendukung dan melengkapi data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah Studi Kepustakaan, , yaitu dengan membaca, memahami, mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet.

4. Analisis Data

Tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pertama, data primer dikuantitatifkan terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya menganalisis data sekunder sebagai data pendukung, analisis dilakukan dengan cara mendiskripsikan hukum positif sebagai bahan hukum primer. Metode dengan cara analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang selanjutnya dianalisis untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum. Kemudian, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

5. Proses Berfikir/Prosedur Bernalar

Dalam penarikan kesimpulan, proses berfikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu menganalisis dengan mengkaji peraturan-peraturan yang umum untuk dibandingkan dengan fakta-fakta khusus yang terjadi di lapangan. Dari kedua alur berpikir tersebut nantinya ditarik suatu kesimpulan. Dalam hal ini proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran limbah golongan B3. Bagian khususnya yaitu hasil putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN Bbs dalam kaitannya dengan pengaturan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran limbah golongan B3 di Kabupaten Brebes

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum yang disusun ini terdiri dari 3 (tiga) Bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang diuraikan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat. Pembahasan dibagi menjadi empat bagian : pertama tinjauan umum pengaturan tentang penerapan sanksi pidana, kedua tinjauan umum tentang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), ketiga penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran limbah B3 di Kabupaten Brebes yang mencakup analisis terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran akibat limbah B3 di Kabupaten Brebes. (Berdasarkan Putusan MA Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN Bbs), dan ke empat mengenai kendala dan solusi bagi penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3

BAB III: PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab selanjutnya, maka penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian bahwa :

1. Bagi setiap pelaku pencemaran lingkungan sudah diterapkan sanksi pidana berdasarkan pengaturan pada dasar hukum yang berlaku yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa pidana penjara dan pidana denda yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115. Terkhusus pencemaran lingkungan akibat limbah B3 diatur dalam Pasal 102-103 dan Pasal 106-107. Kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Brebes merupakan perbuatan dumping limbah B3 yang tidak disertai dengan izin oleh badan yang berwenang dan perbuatan dumping dilakukan di lokasi yang belum ditentukan melainkan di halaman belakang gudang terdakwa. Sehingga terdakwa dipidana 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) mengacu pada Pasal 104 UUPPLH dengan dasar pertimbangan kegiatan dumping terdakwa tidak disertai dengan izin oleh badan yang bersangkutan dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat juga mengganggu keseimbangan lingkungan hidup.
2. Masih ditemukan beberapa kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindakan pencemaran lingkungan melalui limbah B3 yaitu kurangnya kepastian hukum terkait batasan – batasan yang menggolongkan

jenis perbuatan yang dilakukan dengan dampak yang dihasilkan. Mengenai klasifikasi pengaturan penerapan sanksi pidana pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tidak memiliki acuan pada aturan atau dasar hukum sebelumnya. Selain itu, dalam Pasal 104 perihal perizinan melakukan dumping tidak dijelaskan dan diklasifikasikan limbah yang menjadi objek dalam kegiatan dumping. Kendala lainnya, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup melalui limbah B3 kurang mempertimbangkan aspek-aspek lainnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, masih terdapat masyarakat yang bersikap skeptisme dan masih ditemukannya sikap oknum yang arogan dengan kewenangan yang dimiliki.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran antara lain :

1. Menegakkan dan mempertegas sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan berdasarkan dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum yang berlaku. Terlebih lagi sinkronisasi terhadap aturan-aturan atau dasar hukum yang berlaku terkait jenis pencemaran lingkungan melalui limbah B3 dan adanya peninjauan terhadap jenis-jenis limbah B3 yang nanti dapat menjadi tolak ukur dalam penjatuhan sanksi pidana.

2. Melibatkan para pakar yang ahli dalam bidang sektoral (yang terkait substansi kasus lingkungan), lingkungan hidup, korporasi dan lainnya guna membantu melakukan kajian atau audit lingkungan hidup yang nantinya membantu memberikan kesimpulan telah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, sebab pencemaran dan kerusakan lingkungan bisa mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu dengan adanya keterlibatan terhadap para pakar mampu menjadi kesempatan untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pencemaran lingkungan beserta sanksi-sanksi yang diberikan apabila melanggar berdasarkan dasar hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku

- Darmono, 2001, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran : Hubungannya dengan Toksikologi senyawa logam*, UI-Press, Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2016 *Hukum Pidana*, Pusat penerbitan dan pecetakan (AUP), Surabaya.
- Riyanto, 2013, *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Yulinah Trihadiningrum, 2016, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*, Teknosain, Yogyakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta.

Jurnal

- Harjanto, 2016, *Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Denda Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar*, Vol. 1 Nomor 1, Universitas Tanjungpura.
- Mira Rosana, 2018, *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia*, *Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 No.1, Universitas Pasundan.

Tesis

- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2009, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponnyomanegoro Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Lembaran Negara Tahun

2009 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Lembaran Negara Nomor 333 Tahun 2014; Tambahan Lembaran Negara No 5617.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ,2007,Sinar Grafika,Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,2016,Sinar Grafika,Jakarta.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/Pid.B/LH/2020/PN Bbs.

Website

Kementrian Industri, <https://www.kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri> , diakses pada 20 September 2020

Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, <https://brebeskab.bps.go.id/>, diakses pada 15 Oktober 2020

Sistem Informasi Perumahan, Profil Kondisi Geografis Kabupaten Brebes, <http://si.disperakim.jatengprov.go.id/>, diakses pada 15 Oktober 2020

Sanksi pencemaran lingkungan hidup https://hulondalo.id/sanksi_pencemaran_lingkungan-hidup/, diakses pada 20 September 2020.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia,2008, Balai Pustaka, Jakarta.